

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR TERHADAP PROBLEMATIKA, IMPLEMENTASI, DAN SOLUSI STRATEGIS

Sam Sukur Rahman

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Corresponding Author: sukursyam9@gmail.com

Winengan

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

winengan@uinmataram.ac.id

Hadi Kusuma Ningrat

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

hadiknt@uinmataram.ac.id

Article History

Submitted: 08 Apr 2026; **Revised:** 30 May 2026; **Accepted:** 30 May 2026

DOI 10.20414/tsaqafah.v25i1.14779

Abstract

This study aims to analyze Islamic education policies in government-managed formal Islamic educational institutions in Indonesia, focusing on the problems of policy implementation, management challenges, and strategic solutions for improving educational quality. This study focuses on the context of Islamic education in madrasahs as part of the national education system to obtain a more focused and contextual analysis. The study uses a qualitative approach with a library research method, with data sourced from books, scientific journals, and relevant policy documents. Data collection techniques were carried out through documentation, while data analysis used content analysis techniques to systematically review and synthesize various research findings. The results of the study indicate that Islamic education policy in Indonesia still faces various problems, including dualism in the education system, low quality human resources, weak institutional governance, and a lack of adaptation to developments in the digital era. Policy implementation also shows a gap between formulation and implementation, which is influenced by a top-down approach, limited resources, and contextual factors in the field. Therefore, strategic solutions are needed in the form of strengthening the integration of the education system, improving the quality of human resources, improving the management of educational institutions, and adaptive policy transformation to technological developments.

Keywords: *Islamic education policy, literature study, policy implementation, educational problems, strategic solutions*

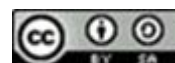
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam pada lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia yang dikelola pemerintah, dengan fokus pada problematika implementasi kebijakan, tantangan pengelolaan, serta solusi strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Kajian ini difokuskan pada konteks pendidikan Islam di madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional guna memperoleh analisis yang lebih terarah dan kontekstual. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*), dengan data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik *content analysis* untuk mengkaji dan mensintesis berbagai temuan penelitian secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika, antara lain dualisme sistem pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya adaptasi terhadap perkembangan era digital. Implementasi kebijakan juga menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan dan pelaksanaan, yang dipengaruhi oleh pendekatan top-down, keterbatasan sumber daya, serta faktor kontekstual di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis berupa penguatan integrasi sistem pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan manajemen lembaga pendidikan, serta transformasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata-kata kunci: kebijakan pendidikan Islam, studi literatur, implementasi kebijakan, problematika pendidikan, solusi strategis.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam yang memiliki karakteristik khas dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan keilmuan secara simultan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan Islam memiliki posisi penting karena menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional sekaligus berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, moral, dan identitas keagamaan masyarakat (Muhaimin, 2012). Eksistensi pendidikan Islam juga semakin diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang memberikan legitimasi kelembagaan terhadap madrasah dan lembaga pendidikan Islam formal lainnya dalam sistem pendidikan nasional (Maksum, 1999). Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara formulasi kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan, terutama berkaitan dengan mutu pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas tata kelola lembaga pendidikan Islam (Azyumardi Azra, 2019). Selain itu, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah juga menjadi tantangan serius, khususnya pada madrasah di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan sarana, pendanaan, dan tenaga pendidik profesional (Daulay, 2018).



Problematika tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan pendidikan modern. Oleh karena itu, diperlukan kajian literatur yang komprehensif untuk menganalisis problematika implementasi kebijakan pendidikan Islam pada madrasah di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi solusi strategis yang relevan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan.

Secara konseptual, kebijakan pendidikan Islam diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual. Akan tetapi, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut seringkali belum berjalan secara efektif. Tilaar dan Nugroho (2016) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung menghadapi persoalan inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan akibat lemahnya koordinasi serta kurangnya kesiapan sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan perkembangan zaman. Di sisi lain, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital semakin memperumit dinamika kebijakan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya. Azyumardi Azra (2012) menegaskan bahwa pendidikan Islam perlu melakukan transformasi agar tetap relevan dengan perkembangan modernitas, sekaligus mempertahankan identitas keislamannya. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan transformasi tersebut, terutama dalam hal integrasi teknologi, inovasi kurikulum, dan peningkatan kualitas sumber daya pendidik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek kebijakan pendidikan Islam. Muhaimin (2009) menemukan bahwa kebijakan pendidikan Islam cenderung bersifat top-down, sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan di tingkat satuan pendidikan. Sementara itu, Nata (2018) menunjukkan bahwa lemahnya manajemen dan tata kelola lembaga pendidikan Islam menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian lain juga menyoroti pentingnya penguatan mutu pendidikan dan profesionalisme guru sebagai bagian integral dari keberhasilan kebijakan pendidikan Islam. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum memberikan gambaran komprehensif yang mengintegrasikan problematika, implementasi, serta solusi strategis dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mengambil posisi sebagai kajian yang berupaya mengisi kekosongan penelitian melalui analisis komprehensif dengan pendekatan studi literatur. Sejumlah penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada aspek implementasi

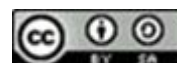
kebijakan pendidikan Islam secara parsial, seperti manajemen madrasah, mutu pendidikan, atau problematika kurikulum secara terpisah (Rahim, 2016). Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan analisis problematika kebijakan, implementasi, dan formulasi solusi strategis pendidikan Islam secara komprehensif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan sintesis yang lebih menyeluruh terhadap dinamika kebijakan pendidikan Islam pada madrasah di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji berbagai persoalan kebijakan pendidikan Islam, tetapi juga menelaah implementasinya dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam formal serta merumuskan solusi strategis berdasarkan sintesis berbagai hasil penelitian terdahulu dan perkembangan kebijakan pendidikan nasional terkini (Azyumardi Azra, 2019). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam sekaligus menjadi referensi konseptual bagi pemerintah, pengelola madrasah, dan pemangku kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih relevan dengan kondisi masalah pendidikan dewasa ini.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia melalui kajian literatur, dengan menitikberatkan pada identifikasi problematika, evaluasi implementasi, dan perumusan solusi strategis. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kajian yang komprehensif dan integratif dalam memahami kebijakan pendidikan Islam di tengah berbagai tantangan kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, praktisi pendidikan, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan.

2. LANDASAN TEORI

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dikaji dalam penelitian ini berdasarkan perspektif analisis kebijakan dan pendidikan Islam dengan tujuan untuk menemukan problematika, memahami implementasi, serta merumuskan solusi strategis. Secara konseptual, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik tertentu. Dye (2013, hlm. 3) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konteks pendidikan, kebijakan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan sistem pendidikan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai regulasi formal, tetapi juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman.



Dalam kajian pendidikan Islam, konsep pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan spiritual. Al-Attas (1991, hlm. 25) mengemukakan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beradab (insan adabi), yaitu manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan akhlak. Sejalan dengan itu, Azra (2012, hlm. 45) menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam harus dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan kontekstual masyarakat modern.

Analisis kebijakan pendidikan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji efektivitas suatu kebijakan. Dunn (2018, hlm. 45) menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah proses intelektual yang bertujuan menghasilkan informasi untuk memecahkan masalah kebijakan melalui pendekatan sistematis. Dalam prosesnya, analisis kebijakan meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Anderson (2011, hlm. 78) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh keterkaitan antar tahapan tersebut. Dengan demikian, dalam konteks pendidikan Islam, analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada implementasi dan dampaknya terhadap mutu pendidikan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Grindle (1980, hlm. 8) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Dalam pendidikan Islam, implementasi kebijakan seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Muhaimin (2009, hlm. 156) berpendapat bahwa kebijakan pendidikan Islam yang bersifat top-down cenderung kurang efektif karena tidak mempertimbangkan kondisi riil di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan implementasi yang lebih partisipatif dan kontekstual.

Problematisa kebijakan pendidikan Islam juga tidak terlepas dari dinamika sistem pendidikan nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme sistem pendidikan, ketimpangan kualitas, serta rendahnya daya saing global. Tilaar (2012, hlm. 134) menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia mengalami fragmentasi yang berdampak pada tidak meratanya kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam perlu diarahkan pada integrasi sistem, peningkatan mutu, serta penguatan tata kelola lembaga pendidikan agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman.

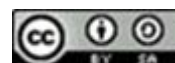
Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, diperlukan solusi strategis yang berbasis pada pendekatan komprehensif. Senge (2006, hlm. 27) mengemukakan bahwa pendekatan sistem (*systems thinking*) dapat digunakan untuk memahami hubungan antar komponen dalam suatu sistem sehingga menghasilkan solusi yang lebih holistik. Selain itu, Nata (2018, hlm. 89) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus berbasis pada nilai (*value-based approach*) yang mampu membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh. Integrasi teknologi dan inovasi pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam solusi kebijakan pendidikan Islam di era digital.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin (2009), Azra (2012), Tilaar (2012), Nata (2018), serta berbagai penelitian kontemporer terkait kebijakan pendidikan Islam. Penelitian Muhaimin (2009) mengkaji implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam konteks kelembagaan. Azra (2012) membahas transformasi pendidikan Islam dalam menghadapi modernitas. Tilaar (2012) mengkaji sistem pendidikan nasional dan kebijakan pendidikan secara umum. Nata (2018) menyoroti manajemen dan mutu pendidikan Islam. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami kebijakan pendidikan Islam, namun masih bersifat parsial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena mengkaji secara komprehensif problematika, implementasi, dan solusi strategis kebijakan pendidikan Islam melalui pendekatan studi literatur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Penelitian studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Creswell (2014, hlm. 23), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data, termasuk dokumen dan literatur ilmiah. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan menelaah problematika, implementasi, serta solusi strategis berdasarkan berbagai referensi ilmiah yang kredibel dan mutakhir.

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dengan kajian pendidikan Islam. Sumber data utama berasal dari jurnal nasional terakreditasi, buku ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, sumber data pendukung diperoleh dari hasil seminar, prosiding, laporan penelitian, dan dokumen kelembagaan lain yang relevan dengan fokus kajian.



Pemilihan sumber data tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif, kredibel, dan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Sugiyono (2019, hlm. 225) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau sumber yang telah tersedia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam. Menurut Arikunto (2013, hlm. 274), teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen tertulis, baik berupa buku, jurnal, maupun arsip yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur yang memiliki kredibilitas tinggi serta relevansi yang kuat dengan fokus penelitian.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang dibantu dengan pedoman analisis literatur berbentuk lembar *checklist* analisis data. *Checklist* tersebut digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengevaluasi informasi penting dari berbagai sumber literatur, seperti problematika kebijakan, implementasi kebijakan pendidikan Islam, serta solusi strategis yang ditemukan dalam penelitian terdahulu dan dokumen kebijakan terkait. Peneliti berperan dalam menentukan sumber data, mengklasifikasikan data, serta menganalisis isi dari berbagai literatur yang dikaji. Selain itu, digunakan juga lembar pencatatan data (data sheet) untuk memudahkan proses identifikasi, klasifikasi, dan sintesis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2017, hlm. 168) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang berperan langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi topik dan fokus penelitian, (2) penelusuran sumber literatur yang relevan melalui database jurnal, buku, dan dokumen resmi, (3) seleksi sumber data berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kebaruan, (4) pengelompokan data sesuai dengan fokus kajian, yaitu problematika, implementasi, dan solusi kebijakan pendidikan Islam, serta (5) pencatatan dan pengorganisasian data untuk memudahkan proses analisis. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis isi digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam berbagai sumber literatur. Krippendorff (2018, hlm. 24) menyatakan bahwa analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk membuat inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari

data dalam konteksnya. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil sintesis dari berbagai sumber literatur. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia serta memberikan rekomendasi solusi strategis yang berbasis kajian ilmiah

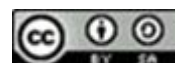
4. PEMBAHASAN

a. Analisis Problematika Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam praktiknya masih menghadapi berbagai problematika yang kompleks dan multidimensional. Berdasarkan hasil analisis literatur yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan pendekatan content analysis, ditemukan bahwa problematika utama kebijakan pendidikan Islam mencakup aspek regulasi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi pendidikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdullah (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi persoalan inkonsistensi implementasi regulasi dan rendahnya efektivitas pengawasan kelembagaan. Selain itu, penelitian Fauzi dan Nikmah (2021) menunjukkan bahwa kualitas tenaga pendidik dan kompetensi manajerial lembaga pendidikan Islam masih menjadi faktor penghambat dalam peningkatan mutu pendidikan.

Hasil kajian ini juga memperlihatkan bahwa problematika pendidikan Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkaitan erat dengan kemampuan lembaga pendidikan Islam dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Penelitian Syarif (2022) menegaskan bahwa banyak madrasah masih mengalami keterbatasan dalam pengembangan digitalisasi pembelajaran, inovasi kurikulum, dan penguatan daya saing pendidikan. Sementara itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan lembaga, dan dukungan sumber daya menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi kebijakan pendidikan Islam di berbagai daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu sekaligus menambahkan analisis integratif bahwa problematika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia saling berkaitan antar aspek dan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif serta berkelanjutan.

Secara regulatif, kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi persoalan dualisme sistem pendidikan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Dualisme ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengelolaan, pendanaan, serta standar mutu pendidikan. Tilaar



(2012) menegaskan bahwa fragmentasi sistem pendidikan di Indonesia berdampak pada tidak meratanya kualitas pendidikan antar lembaga, termasuk lembaga pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan sistem pendidikan secara utuh.

Dari aspek sumber daya manusia, kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik masih menjadi persoalan utama. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru di lembaga pendidikan Islam belum merata, baik dari segi pedagogik, profesional, maupun penguasaan teknologi. Kondisi ini diperkuat oleh Muhaimin (2009) yang menyatakan bahwa lemahnya kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pendidikan Islam. Selain itu, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam problematika kebijakan pendidikan Islam. Tata kelola lembaga pendidikan Islam yang belum optimal, khususnya dalam hal manajemen berbasis mutu, menyebabkan kebijakan yang dirumuskan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Nata (2018) menegaskan bahwa lemahnya manajemen pendidikan Islam berdampak pada rendahnya daya saing lembaga pendidikan Islam di tingkat nasional maupun global.

Dalam konteks perkembangan zaman, tantangan era digital juga menjadi problematika yang signifikan. Kebijakan pendidikan Islam belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan peserta didik dengan sistem pembelajaran yang diterapkan. Azra (2012) menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mampu bertransformasi agar tetap relevan dengan perkembangan modernitas, namun kebijakan yang ada belum sepenuhnya mendukung transformasi tersebut.

b. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Implementasi kebijakan pendidikan Islam merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980), yang menekankan pada dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

1) Analisis Aspek Isi Kebijakan (Content of Policy)

Isi kebijakan pendidikan Islam secara umum telah mencakup tujuan yang jelas, yaitu peningkatan mutu pendidikan, penguatan karakter, dan integrasi nilai-nilai keislaman. Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan tersebut seringkali bersifat normatif dan belum operasional. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan dalam penerjemahan kebijakan ke dalam program-program konkret di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, kebijakan pendidikan Islam

masih cenderung bersifat top-down, sehingga kurang memperhatikan kebutuhan riil di tingkat bawah. Muhaimin (2009) menyatakan bahwa pendekatan top-down dalam kebijakan pendidikan menyebabkan rendahnya partisipasi stakeholder dalam proses implementasi, sehingga kebijakan menjadi kurang efektif dan tidak kontekstual.

2) Analisis Aspek Konteks Implementasi (Context of Implementation)

Implementasi kebijakan pendidikan Islam pada madrasah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta kesiapan kelembagaan pendidikan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi Muna Hajita (2024). Berdasarkan hasil analisis literatur, faktor sumber daya dan kesiapan kelembagaan menjadi hambatan dominan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam di berbagai daerah. Penelitian Hidayat (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran pendidikan dan rendahnya pemerataan fasilitas pendidikan menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan Islam belum berjalan secara optimal, khususnya pada madrasah di wilayah terpencil.

Selain faktor sumber daya, budaya organisasi pada lembaga pendidikan Islam juga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam kajian teori budaya organisasi Schein (2010), budaya lembaga memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan institusi dalam menerima perubahan dan inovasi. Hasil penelitian Nasution (2022) menemukan bahwa sebagian lembaga pendidikan Islam masih mempertahankan pola pengelolaan tradisional sehingga proses adaptasi terhadap inovasi kebijakan, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan manajemen modern berjalan relatif lambat. Temuan tersebut sejalan dengan hasil analisis penelitian ini yang menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan, lemahnya kapasitas manajerial, serta kurangnya pelatihan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan Islam secara efektif. Di sisi lain, penelitian Karim (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh sinergi antara pemerintah, pengelola lembaga pendidikan, dan masyarakat. Namun, hasil kajian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan masih belum optimal sehingga berbagai program kebijakan pendidikan Islam sering kali mengalami ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi implementasi kebijakan pendidikan Islam perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sumber daya, budaya organisasi, kapasitas kelembagaan, dan dukungan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Untuk memperjelas hasil evaluasi implementasi kebijakan pendidikan Islam, berikut disajikan tabel ringkasan temuan analisis:



Tabel 1
Ringkasan Problematika dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

No	Aspek	Temuan Utama
1	Regulasi	Dualisme sistem pendidikan dan inkonsistensi kebijakan
2	SDM	Kompetensi guru belum merata dan kurang adaptif terhadap teknologi
3	Kelembagaan	Manajemen belum optimal dan rendahnya daya saing lembaga
4	Teknologi	Kebijakan belum adaptif terhadap era digital
5	Implementasi	Pendekatan top-down dan keterbatasan sumber daya

Tabel 1. menunjukkan bahwa problematika kebijakan pendidikan Islam tidak hanya terletak pada satu aspek, tetapi merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam merumuskan solusi kebijakan.

c. Solusi Strategis Kebijakan Pendidikan Islam

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, solusi strategis kebijakan pendidikan Islam perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan pendekatan sistem dan berbasis nilai. Pendekatan sistem (systems thinking) sebagaimana dikemukakan oleh Senge (2006) memungkinkan pengambil kebijakan untuk memahami keterkaitan antar komponen dalam sistem pendidikan sehingga dapat merumuskan solusi yang holistik.

1) Penguatan Integrasi Sistem Pendidikan

Salah satu solusi strategis dalam penguatan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia adalah mengintegrasikan sistem pendidikan umum dan pendidikan Islam secara lebih sinergis melalui penyelarasan kurikulum, standar mutu, serta sistem evaluasi pendidikan. Dalam perspektif teori integrasi pendidikan, pendidikan Islam tidak seharusnya diposisikan secara dikotomis dengan pendidikan umum, melainkan dikembangkan secara terpadu agar mampu menghasilkan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keislaman. Hasil penelitian Ma'arif dan Suhartini (2024) menunjukkan bahwa integrasi kurikulum pada madrasah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran karena peserta didik memperoleh penguatan kompetensi akademik sekaligus pembentukan karakter religius secara seimbang. Selain itu, penelitian Ramadhani dan Fikri (2025) menjelaskan bahwa harmonisasi standar mutu pendidikan umum dan pendidikan Islam dapat memperkuat daya saing madrasah dalam sistem pendidikan nasional serta mengurangi kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan.

Implementasi integrasi pendidikan juga perlu didukung oleh penguatan sistem evaluasi dan tata kelola kelembagaan yang adaptif terhadap perkembangan pendidikan modern. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, dualisme sistem pendidikan selama ini menyebabkan adanya perbedaan orientasi kebijakan, distribusi sumber daya, serta standar pengelolaan pendidikan



antara sekolah umum dan madrasah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hasyim, Nurhayati, dan Arifin (2026) yang menegaskan bahwa integrasi kebijakan pendidikan Islam dan pendidikan nasional dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan, terutama dalam aspek pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan mutu tenaga pendidik. Oleh karena itu, integrasi pendidikan umum dan pendidikan Islam perlu diarahkan pada pembangunan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemerataan mutu pendidikan di berbagai daerah.

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam. Dalam perspektif teori kompetensi guru yang dikemukakan oleh Shulman, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pedagogik, penguasaan materi, dan kemampuan guru dalam mengintegrasikan strategi pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, penguatan kompetensi guru pada madrasah masih menjadi tantangan utama, terutama dalam aspek pemanfaatan teknologi pembelajaran, inovasi metode mengajar, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauziah dan Masyhud (2024) yang menunjukkan bahwa sebagian tenaga pendidik pada lembaga pendidikan Islam masih mengalami keterbatasan kompetensi digital dan rendahnya akses terhadap pelatihan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembelajaran belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pendidikan di era digital.

Selain itu, pengembangan profesional guru perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada penguatan kompetensi pedagogik dan profesional secara berkelanjutan. Penelitian Rahman dan Azizah (2025) menjelaskan bahwa pelatihan berbasis digital yang terintegrasi dengan penguatan kompetensi pedagogik mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, kreativitas guru, serta kualitas interaksi belajar di madrasah. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan mutu tenaga pendidik akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh sistem pelatihan yang berkelanjutan, supervisi akademik yang adaptif, dan dukungan kelembagaan yang memadai. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Sulaiman, Fitriani, dan Hidayat (2026) yang menegaskan bahwa penguatan kompetensi profesional guru menjadi fondasi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, terutama dalam menghadapi transformasi teknologi dan perubahan kebutuhan pendidikan masyarakat modern. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu menempatkan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan pendidikan nasional.



3) Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Lembaga

Penguatan tata kelola lembaga pendidikan Islam perlu dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis mutu. Hal ini mencakup perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan. Nata (2018) menegaskan bahwa manajemen yang baik akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

4) Adaptasi terhadap Era Digital

Dalam menghadapi era digital, kebijakan pendidikan Islam dituntut mampu mengintegrasikan teknologi secara sistematis dalam proses pembelajaran melalui pengembangan kurikulum berbasis digital, penggunaan media pembelajaran interaktif, serta penguatan literasi digital bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Dalam perspektif teori connectivism yang dikemukakan Siemens, pembelajaran di era digital menekankan pentingnya kemampuan individu dalam membangun jejaring pengetahuan, mengakses informasi secara kritis, dan memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari proses belajar. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, transformasi digital pada pendidikan Islam menjadi kebutuhan mendesak karena masih banyak madrasah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi digital tenaga pendidik, serta belum optimalnya integrasi teknologi dalam kurikulum dan sistem pembelajaran. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pratama dan Kurniawati (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis digital pada madrasah mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, partisipasi peserta didik, dan akses terhadap sumber belajar yang lebih luas. Selain itu, penelitian Hidayani, Arif, dan Maulana (2025) menjelaskan bahwa penguatan literasi digital pada lembaga pendidikan Islam tidak hanya berfungsi meningkatkan kemampuan teknologi peserta didik, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan selektif dalam menghadapi arus informasi digital.

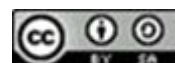
Hasil kajian ini juga memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam pendidikan Islam memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif, meliputi penyediaan infrastruktur teknologi, pelatihan tenaga pendidik berbasis digital, serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Nurfadillah dan Hakim (2026) yang menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan Islam dapat meningkatkan mutu dan daya saing madrasah apabila didukung oleh tata kelola kelembagaan yang inovatif serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas, efektivitas, dan relevansi pendidikan Islam agar mampu menjawab tantangan pendidikan modern secara berkelanjutan.

5) Implikasi Strategis terhadap Kebijakan Pendidikan

Implementasi berbagai solusi strategis tersebut memiliki implikasi penting terhadap pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam perspektif teori human capital, pendidikan berperan sebagai sarana utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan berdaya saing, sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam, keberhasilan pendidikan juga mencakup pembentukan karakter dan integritas moral peserta didik. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas guru, digitalisasi pembelajaran, modernisasi tata kelola madrasah, serta pengembangan kurikulum yang adaptif dapat meningkatkan efektivitas pendidikan Islam secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suyitno, Mufidah, dan Rahman (2024) yang menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi mampu meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan. Selain itu, Fathurrohman dan Anwar (2025) menemukan bahwa kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan cenderung lebih efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai berpotensi menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter religius, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa problematika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia terletak pada belum optimalnya integrasi sistem pendidikan, rendahnya kualitas dan pemerataan sumber daya manusia, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta kurangnya adaptasi terhadap perkembangan era digital. Selain itu, implementasi kebijakan yang cenderung bersifat top-down dan belum kontekstual dengan kebutuhan lapangan semakin memperkuat kesenjangan antara perumusan kebijakan dan praktik di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, solusi strategis yang diperlukan adalah penguatan integrasi sistem pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola lembaga pendidikan Islam, serta transformasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kebijakan pendidikan Islam yang dirumuskan secara komprehensif, partisipatif, dan berbasis nilai diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik dan berkarakter, sehingga dapat menjawab tantangan pendidikan di era modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2020). *Pendidikan Islam: Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking: An introduction* (7th ed.). Boston: Wadsworth.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Daulay, H. P. (2018). *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Boston: Pearson.
- Fathurrohman, M., & Anwar, S. (2025). Kebijakan pendidikan Islam berbasis kolaborasi stakeholder dalam meningkatkan mutu madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 10(1), 55-69.
- Fauzi, A., & Nikmah, L. (2021). Problematika implementasi kebijakan pendidikan Islam di madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 145-158.
- Fauziah, N., & Masyhud, M. S. (2024). Penguatan kompetensi digital guru madrasah dalam era transformasi pendidikan. *Jurnal Tarbiyah dan Keguruan*, 9(1), 33-48.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Hasyim, A., Nurhayati, S., & Arifin, Z. (2026). Integrasi kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan Islam dalam penguatan mutu madrasah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 15-29.
- Hidayani, R., Arif, M., & Maulana, A. (2025). Literasi digital sebagai strategi penguatan pendidikan Islam di era teknologi. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Islam*, 8(2), 88-101.
- Hidayat, R. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan Islam pada madrasah di daerah terpencil. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 6(2), 77-91.
- Karim, A. (2020). Sinergi stakeholder dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 101-114.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2022). Budaya organisasi dan implementasi inovasi pada lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 120-134.
- Nata, A. (2018). *Manajemen pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rahim, H. (2016). *Arab baru pendidikan Islam di Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.
- Rahman, F., & Azizah, N. (2025). Pengembangan profesional guru berbasis digital pada madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Islam*, 10(1), 72-86.
- Ramadhani, A., & Fikri, M. (2025). Harmonisasi standar mutu pendidikan Islam dan pendidikan nasional. *Jurnal Evaluasi Pendidikan Islam*, 8(1), 25-40.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bas
- Senge, P. M. (2006). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. New York: Doubleday.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2016). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

